

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andhika Prayoga, S.H., 2014, *Solusi Hukum ketika Bisnis Terancam pailit*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajagarfindo Perdasa, Jakarta
- Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- DR. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara
- Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., 2010, *Problematika Hukum di Bidang Bisnis dan Korporasi*”, PPHBI
- Dr. Darwis Anatami, S.H., M.H., 2021, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*, Deepublish
- Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S dan Sularto, S.H., CN., M. Hum, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, ANDI, Yogyakarta
- Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A, 2020, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, UKI PRESS, Jakarta
- Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009
- H. Riduan Syahrani, S.H., 2015, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni,
- I Ketut Oka setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Munir Fuady, 2017, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- R. Anton Suyatno, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta,

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.*, Liberti, Yogyakarta

Salim H.S., S.H., M.S., *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa, Jakarta,

William T. Major 2018., *Hukum Kontrak*, Nuansa Cendekia, Bandung

Wahyu Utami, S.H., M.H., dan Yogabakti Adipradana, S., S.T., S.H. 2017, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jala permata Aksara

2. Dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum.

3. Makalah, Jurnal, Majalah, dan lain-lain

Monavia Ayu Rizaty, 2023, “Jumlah Perkara PKPU Meningkat saat Pandemi Covid-19”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/26/jumlah-perkara-pkpu-meningkat-saat-pandemi-covid-19>

Siti Rafika, Skripsi: “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi” (Pekanbaru: Universitas Riau, 2015), hlm. 8.

Mengenal lebih jauh tentang Society 5.0”

<https://www.antaraneews.com/berita/2492665/mk-perlu-reformasi->

penegakan-hukum-untuk-sambut-society-50 , di akses tanggal 9
September 2022

Sutan Remy Sjahdeini, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-
Undang No. 37 Tahun 2004 tentan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, hlm.424

